

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy., MADE, Ph.D., APU

MEMBANGUN INVESTASI DAERAH



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
dan PT Balai Pustaka (Persero)



MEMBANGUN INVESTASI DAERAH

Penyunting Ahli: Carunia Mulya Firdausy
Penyunting: Tim Balai Pustaka
Penata Letak: Tim Balai Pustaka
Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein

Cetakan Kesatu, 2016
@Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh
Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka (Persero)

Jalan Bunga No. 8-8A
Matraman, Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583369. Faks. (021) 29622129
Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

332.6
h Harefa, Mandala, dkk
m **Membangun Investasi Daerah/Mandala Harefa, dkk. – cet. ke- 1 –**
Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
xiv 138 hlm.; 14,8 × 21 cm. – (Seri BP No. 6659)
1. Membangun Investasi Daerah
I. Sony Hendra Permana II. Dewi Restu Mangeswuri
III. Hilma Meilani
EAN 978-602-260-105-0

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Pada era pemerintahan Jokowi saat ini, investasi menjadi perhatian yang sangat serius. Hal ini salah satunya disebabkan karena saat ini peringkat kemudahan berusaha Indonesia berada pada rangking 109, jauh di bawah negara-negara tenangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darrussalam, Vietnam dan Philipina. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia juga saat ini sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA). Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan investasi diIndonesia.

Hadirnya buku dengan judul “Membangun Investasi Daerah” ini sangat tepat. Saya menilai buku ini menarik mengingat pemerintahan daerah juga memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Daerah menjadi ujung tombak dari pelaksanaan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Bahasan dalam buku ini mencakup dua dimensi utama yaitu: (a) faktor kelembagaan; dan (b) potensi ekonomi daerah. Pada dimensi *pertama*, bahasan pokoknya meliputi bagaimana faktor kelembagaan berperan dalam peningkatan investasi daerah. Pada bagian ini diuraikan kondisi investasi, khususnya PMA dan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam peningkatan investasi, baik melalui peran kepala daerah maupun peran institusi

perizinan di daerah. Pada dimensi *kedua*, bahasan pokok akan mengulas potensi ekonomi daerah, bagaimana memasarkannya melalui kerja sama antar daerah. Dari potensi yang ada dapat pula diukur rasio efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap investasi di daerah.

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas berbagai permasalahan investasi di daerah, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, diharapkan target pemerintah mencapai ranking 40 dalam hal kemudahan berusaha di tahun 2017 dapat terwujud.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan perumusan strategi dan kebijakan investasi di daerah. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam merancang tema, *outline* KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan peningkatan daya saing Indonesia. Amin.

Jakarta, 30 September 2016
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si.

PROLOG

Dalam era globalisasi saat ini, arus modal dapat dengan mudah berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia arus modal tersebut merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan. Untuk itu, setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka untuk menarik investasi. Kondisi kemudahan berusaha di Indonesia, yang saat ini menduduki rangking 109 menurut Bank Dunia, menjadi peringatan yang keras agar Indonesia berbenah untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi masuknya investasi, khususnya penanaman modal asing (PMA). Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun paket kebijakan agar dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia. Bahkan pemerintah telah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia menduduki setidaknya rangking 40 pada tahun 2017. Namun demikian usaha memperbaiki kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu dukungan dari pemerintahan daerah.

Dalam konteks kelembagaan, peran kepala daerah sangat besar dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Kewenangan kepala daerah dalam menempatkan

aparatur pelayanan, membuat peraturan daerah, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting. Apakah kewenangan tersebut ramah terhadap investasi atau sebaliknya, menjadikan biaya investasi yang mahal. Untuk menarik investasi masuk Pemerintahan daerah dituntut untuk berinovasi untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, namun juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing agar pelaksanaan investasi di daerah dapat berjalan lancar. Adanya lembaga perizinan terpadu dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga sangat penting dalam rangka untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pemerintah.

Membangun Investasi Daerah

Adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap daerah mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Jakarta, 30 September 2016
Editor

Membangun Investasi Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
PROLOG	v	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR TABEL	xi	
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR.....	xiii	
BAGIAN PERTAMA		
KONDISI PMA DI INDONESIA DAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENINGKATAN INVESTASI		1
<i>Mandala Harefa</i>		
I. PENDAHULUAN	3	
II. KONDISI PMA DI INDONESIA.....	8	
III. INVESTASI DAN PENTINGNYA DALAM PEREKONOMIAN.....	13	
IV. KEBIJAKAN DALAM MENARIK INVESTASI.....	17	
V. PERAN DAERAH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN	27	
VI. PENUTUP	34	
DAFTAR PUSTAKA	38	
BAGIAN KEDUA		
PERAN KEPALA DAERAH DALAM MEMENGARUHI DAYA TARIK INVESTASI DI INDONESIA		41
<i>Sony Hendra Permana</i>		
I. PENDAHULUAN	43	
II. PERAN PENTING INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN	49	
III. PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENARIK INVESTASI.....	53	
IV. PENUTUP	62	
DAFTAR PUSTAKA	64	

BAGIAN KETIGA

PERAN INSTITUSI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN

IKLIM INVESTASI 67

Dewi Restu Mangeswuri

I. PENDAHULUAN 69

II. KONSEP INVESTASI 72

III. KONSEP PERIZINAN 76

IV. PENYELENGGARAAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP)..... 84

V. PENUTUP 89

DAFTAR PUSTAKA 91

BAGIAN KEEMPAT

RASIO EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI

DAERAH TERHADAP BELANJA DAN INVESTASI DAERAH 95

Hilma Meilani

I. PENDAHULUAN 97

II. KERANGKA KONSEPTUAL KEUANGAN DAERAH
DAN INVESTASI 102

III. KONDISI UMUM KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG 107

IV. ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PAD
DAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP INVESTASI DAERAH 111

V. PENUTUP 120

DAFTAR PUSTAKA 123

EPILOG..... 125

INDEKS 129

BIOGRAFI PENULIS..... 133

BIOGRAFI EDITOR..... 137

DAFTAR TABEL

BAGIAN PERTAMA

Tabel 1	Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap Realisasi Investasi, Tahun 2015-2019	4
Tabel 2	Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berbisnis Dibandingkan dengan Negara ASEAN Tahun 2015 dan 2016	7
Tabel 3	Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA KIB I dan II, Tahun 2004-2009 dan 2010-2014.....	11
Tabel 4	Kebutuhan Investasi (Triliun Rupiah) Tahun 2014-2019	19
Tabel 5	Perkembangan Penyelenggaraan PTSP Tahun 2015 -2019	29

BAGIAN KEDUA

Tabel 1	Daftar PTSP di Indonesia Tahun 2016.....	45
---------	--	----

BAGIAN KETIGA

Tabel 1	Kebijakan dan Perilaku Pemerintah yang Memengaruhi Keputusan Investasi.....	74
---------	---	----

BAGIAN KEEMPAT

Tabel 1	Realisasi PMDN dan PMA Periode Januari-Desember 2014.....	99
Tabel 2	Kriteria Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah.....	106
Tabel 3	Target PAD Kota Palembang Tahun Anggaran 2011-2014	107
Tabel 4	Realisasi PAD Kota Palembang Tahun Anggaran 2011-2014	108
Tabel 5	Perkembangan Realisasi dan Anggaran Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Kota Palembang Tahun 2011-2014	109
Tabel 6	Realisasi Investasi di Kota Palembang Tahun 2011-2014 .	110
Tabel 7	Perkembangan Realisasi PAD terhadap Target PAD Kota Palembang Tahun 2011-2014	111
Tabel 8	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2011-2014.....	112
Tabel 9	Kontribusi PAD terhadap PMDN Kota Palembang Tahun 2011-2014	114

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR

BAGIAN PERTAMA

Grafik 1	Kontribusi terhadap PDB dan Laju Pertumbuhan Investasi (PMTB), 2010-2014	12
Grafik 2	Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2011–Juni 2016: <i>Per Triwulan</i>	21
Grafik 3	Trend Negara Asal PMA (5 Besar): Tahun 2011– Juni 2016	24

BAGIAN KETIGA

Grafik 1	Perkembangan Realisasi Investasi 2011-Juni 2016 (Triwulanan)	71
Grafik 2	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia 2011–2016 (Triwulanan).....	73
Gambar 1	Kemudahan Memulai Usaha – Perbandingan Indonesia dan Negara Lain.....	81
Gambar 2	Kemudahan Kelistrikan – Perbandingan Indonesia dan Negara Lain.....	83
Gambar 3	Capaian Penyederhaan Perizinan	86

BAGIAN KEEMPAT

Gambar 1	Perkembangan Realisasi Investasi 2010-2014: Per Triwulan.....	98
----------	---	----

Membangun Investasi Daerah

EPILOG

Buku dengan judul “Membangun Investasi Daerah” mencakup dua dimensi utama yaitu: (a) faktor kelembagaan; dan (b) potensi ekonomi daerah. Mandala Harefa menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahan Jokowi-JK sangat berkeinginan agar pemerintah Indonesia berupaya menarik investasi dari berbagai negara. Pada periode pemerintah 2015-2019 dalam perencanaan pembangunan bahwa kebutuhan investasi diperlukan guna mendukung pembiayaan infrastruktur. Hal ini dibutuhkan guna terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja. Dengan memperbesar investasi padat pekerja, lapangan kerja baru akan semakin terbuka dimana hal ini menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Untuk itu diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan yang rendah di beberapa daerah. Dalam mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Namun demikian perlu usaha luar baik pemerintah pusat dan daerah, mengingat daya saing dalam menarik investasi di antara negara-negara ASEAN semakin ketat. Pemerintah telah memutuskan beberapa perubahan yang

mendasar dalam peraturan, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Peraturan Presiden dan lain-lain. Namun demikian sejak berlakunya otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah. Keadaan baru sangat diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menarik investasi selain permasalahan-permasalahan klasik yang dihadapi selamam ini.

Faktor kelembagaan menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Peran kepala daerah dalam memengaruhi daya tarik investasi menjadi pembahasan yang dilakukan oleh Sony Hendra Permana. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, kepala daerah dimungkinkan untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun dalam kenyataannya, justru banyak daerah yang menetapkan berbagai aturan yang menghambat investasi. Hal ini tercermin dari 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang di cabut atau direvisi oleh pemerintah pusat dimana mayoritas aturan-aturan tersebut terkait investasi. Kepala daerah seharusnya mampu mempromosikan daerahnya, memiliki kemampuan manajemen organisasi yang baik, dan membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah dalam berinvestasi tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu aspek kelembagaan, institusi perizinan dibentuk untuk memberikan layanan perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dewi Mangeswuri mencermati peran dari institusi perizinan adalah sangat penting, karena institusi ini membuat regulasi dan memiliki

kewenangan penuh berkaitan perizinan. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan investasi adalah aturan yang berbelit dan tumpang tindih sehingga menyulitkan bagi investor. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menjelaskan fungsi institusi perizinan ini dan bagaimana untuk lebih menyederhanakan aturan. Metode penulisan yang dilakukan adalah analisa deskriptif berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi. Yang dapat disimpulkan adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan dan pelayanan investasi, pemerintah telah memiliki konsep pelayanan satu pintu atau yang lebih dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mana semua jenis pengajuan perizinan dilakukan di satu area. Selain itu, pemerintah sebagai regulator juga berperan dalam memberikan pelayanan dan proses perizinan yang cepat dan tanggap. Adapun strategi untuk meningkatkan investasi yaitu dengan membuat regulasi untuk menyederhanakan sistem perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, institusi ini harus terus melakukan koordinasi lintas sektoral bahkan mungkin lebih ditingkatkan secara intensif, sehingga para investor merasa aman dan nyaman dalam menginvestasikan modalnya.

Pada dimensi kedua dalam buku ini, Hilma Meilani mencoba mengungkapkan rasio efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja dan investasi daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong

pertumbuhan investasi daerah. Daerah selain harus melakukan upaya peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerah, juga harus melakukan upaya untuk meningkatkan investasi daerah.

Analisis efektivitas PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan investasi daerah untuk Kota Palembang merupakan suatu objek penelitian yang menarik karena daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pemerintah Kota Palembang menjadikan Palembang sebagai Kota Internasional sebagaimana telah dituangkan ke dalam visi dan misi pembangunan Kota Palembang 2008-2013.

Jakarta, 30 September 2016

Editor

Indeks

A

Anggaran xii, 99, 100, 103, 106,
107, 108, 115, 119, 122,
123, 129
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) 99, 100,
129
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) 99, 100 104,
105, 129
Aturan 129

B

Belanja daerah 102, 103, 129
Belanja langsung 103, 129
Biaya 46, 48, 66, 129
BKPM 4, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
52, 69, 71, 73, 80, 84, 86, 87,
88, 89, 92, 96, 97, 98, 129

E

Ekonomi iii, 15, 17, 21, 36, 38, 50,
51, 52, 54, 61, 62, 64, 69, 91,
99, 122, 129, 133, 134, 135,
137, 138

F

Fiskal 99, 122, 129

I

Iklim 6, 9, 27, 38, 57, 69, 72, 75, 91,
92, 129
Indonesia iii, iv, v, xi, xiii, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32,
35, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 49,
51, 53, 56, 57, 59, 66, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 89, 91, 92, 93, 97,
98, 102, 103, 104, 123, 124,
125, 126, 129, 133, 134, 138
Infrastruktur 24, 59, 61, 64, 116,
130
Institusi 83, 89, 130
Intensifikasi 100, 111, 130
Investasi ii, iii, xi, xii, xiii, 4, 9, 12,
13, 14, 19, 21, 25, 27, 31, 38,
39, 40, 45, 50, 54, 57, 59, 61,
62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74,
75, 91, 92, 96, 97, 98, 100,
101, 103, 109, 114, 122,
125, 130

Investor 20, 36, 130

Izin 25, 39, 46, 47, 48, 52, 60, 65,
66, 76, 77, 78, 87, 130

K

Kebijakan xi, 25, 36, 39, 53, 59, 63,
65, 69, 70, 73, 74, 75, 92,
99, 122, 127, 130, 133, 134,
135, 138

Kepala daerah 54, 60, 63, 126, 130

Kewenangan v, 43, 52, 55, 130

Kontribusi PAD xii, 111, 112, 113,
120, 130

Koordinasi 7, 9, 39, 52, 66, 69, 80,
89, 93, 96, 117, 122, 130

L

Lembaga 7, 27, 28, 29, 51, 64, 130,
134, 137, 138

M

Masyarakat iii, 50, 64, 78, 79, 130,
137

Modal 3, 4, 7, 9, 10, 27, 39, 43, 44,
46, 47, 51, 52, 59, 65, 66, 69,
71, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92,
93, 96, 103, 104, 105, 112,
116, 117, 122, 123, 124,
130, 131

N

Nasional 3, 12, 18, 26, 39, 130, 137

O

Otonomi 32, 54, 69, 75, 82, 131

P

PAD vi, x, xii, 32, 36, 99, 100, 101,
102, 104, 105, 106, 107,
110, 111, 112, 113, 114,
119, 120, 121, 127, 128,
130, 131

PDB xiii, 9, 12, 14, 18, 131

Pelayanan vi, 27, 45, 48, 66, 76, 84,
85, 87, 88, 89, 91, 116, 118,
127, 131

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) vi, 45, 118, 127, 131

Pembangunan 3, 12, 16, 17, 18,
38, 39, 50, 51, 52, 59, 64, 69,
118, 123, 131, 138

Pemda 33, 43, 44, 131

Penanaman Modal Asing 4, 96,
104, 123, 131

Penanaman Modal Dalam Negeri
96, 103, 105, 112, 123, 131

Pendanaan 101, 131

Pendapatan Asli Daerah 99, 101,
102, 106, 111, 122, 131

Pendapatan daerah 131

Pengangguran 131

Peraturan 7, 25, 27, 44, 45, 46, 48,
52, 59, 60, 62, 66, 76, 85, 86,
88, 93, 99, 100, 102, 103,
116, 123, 126, 131

Perda 28, 31, 39, 43, 44, 49, 57, 58,
62, 65, 80, 89, 126, 131

Perimbangan Keuangan 99, 101,
102, 124, 131

Perizinan xiii, 44, 45, 65, 69, 75,
76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86,
89, 91, 92, 93, 131

Pertanahan 26, 131

Pertumbuhan xiii, 5, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 49, 69, 99, 119, 122,
131

R

Rasio efektivitas 110, 132

Regulasi 4, 9, 38, 132

RPJMN 3, 11, 12, 18, 19, 29, 39,
132

S

Sektor unggulan 132

Sistem 27, 45, 78, 88, 132

Sumber Daya Manusia 79, 132

T

Tenaga kerja 72, 132

Transformasi 132

Membangun Investasi Daerah

BIOGRAFI PENULIS

MANDALA HAREFA

Penulis adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1995, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisa kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang dan mempersiapkan makalah bagi Ketua dan Anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang topiknya berkaitan dengan permasalahan ekonomi publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain keuangan Negara dan Daerah , ekonomi Regional dan topik lainnya terkaita dengan ekonomi public yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR dan *Publishing House*. Alamat e-mail yang dapat dihubungi: *mandnias@yahoo.com*.

SONY HENDRA PERMANA

Penulis adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan.

Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia”, “Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM”, dan “Persaingan Usaha Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di *sony_hendra@yahoo.com*.

DEWI RESTU MANGESWURI

Penulis lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta jurusan Akuntansi. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Kandidat Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini adalah Peneliti dengan pangkat/golongan Penata Muda (Golongan III/c) di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pernah ditugaskan sebagai Tim Pemantauan Pelaksanaan UU di DPR RI untuk memantau UU tentang Perindustrian dan UU tentang Undian, serta bersama dengan Tim Pengawasan Internal dan BURT menyusun draft Mekanisme Pengawasan di DPR RI. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP) (Jurnal, 2016), Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha (Buku Tim, 2015), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Banjar dan Kota Denpasar) (Buku Tim, 2014), Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam (Jurnal, 2012). Tugas terkait penyusunan Undang-Undang adalah tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-

Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Saat ini masih menyelesaikan Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulis dapat dihubungi di: *mangeswuri@yahoo.com*.

HILMA MEILANI

Penulis adalah Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Pendidikan S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 *Finance* di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 dan terlibat dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik.. Penulis dapat dihubungi di: *h_meilani@yahoo.com*.

Membangun Investasi Daerah

BIOGRAFI EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE)* dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM)*, serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST)*.



Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi

internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network* (EADN) untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank* (ADB), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS), ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

MEMBANGUN INVESTASI DAERAH



Buku *Membangun Investasi Daerah* mengetengahkan persoalan investasi di daerah pada era globalisasi. Saat ini berpindahannya arus modal dari suatu negara ke negara lainnya secara mudah menjadi sesuatu yang lumrah. Untuk itu, setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka untuk menarik investasi

Kepala daerah dan institusi pendukung lainnya sangat mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerah. Kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap investasi menjadi kebutuhan saat ini. Pemerintahan daerah dituntut untuk berinovasi untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, selain itu hal tersebut perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing agar pelaksanaan investasi di daerah dapat berjalan lancar.

Dalam konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah agar selanjutnya dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
dan PT Balai Pustaka (Persero)

